

PEBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA (STUDI KASUS PELAKSANAAN E- GOVERNMENT)

Dwi Khoiriyanti¹, Syifa AzzahraGoestana Rachman²

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Email : 1801010023@students.unis.ac.id

Email : 1801010118@students.unis.ac.id

Abstrak

Artikel ini dibuat untuk membandingkan implementasi *e-government* di Indonesia dengan Singapura. Penelitian ini berfokus pada perbandingan *e-government* yang berbentuk website. Website Indonesia yaitu (www.Indonesia.go.id) dengan website yang ada pada Singapura yaitu (www.gov.sg). Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode pengumpulan data dengan mengambil data ke perpustakaan dan mengolah bahan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi *e-government* di era revolusi industri saat ini berdampak besar terhadap implementasi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan disetiap negara memiliki formulanya tersendiri yang dimana untuk mencapai dengan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia dan Singapura penerapan *e-government* dapat dilihat dari penerapan masing-masing daerah dalam penggunaan *e-government* baik dalam pengendalian internal pemerintahan maupun menginformasikan kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: *E-government*, Implementasi, Indonesia, Singapura

Abstract

This article was created to compare the implementation of e-government in Indonesia with Singapore. This research focuses on the comparison of e-government in the form of websites. Indonesian website is (www.Indonesia.go.id) with a website in Singapore that is (www.gov.sg). This data collection is done through literature studies and data collection methods by taking data to the library and processing research materials. The result of this research is that the implementation of e-government in the current era of the industrial revolution has a major impact on the implementation of government. The implementation of government in each country has its formula which is to achieve through Information and Communication Technologies (ICT). In Indonesia and Singapore, the application of e-government can be seen from the application of each region in the use of e-government both in internal government control and informing the wider community.

Keywords: *E-government*, Implementation, Indonesia, Singapore

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah terbukti semakin maju dan terlihat dari bagaimana informasi disajikan dengan terobosan-terobosan baru dengan teknologi yang serba digital yang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara dapat diukur yaitu bagaimana perkembangan teknologi berkembang di negara tersebut. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola atau mengelola administrasi, ini merupakan salah satu Langkah yang diambil pemerintah untuk memajukan internal pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini juga pemerintah juga sudah membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih efektif dan efisien melalui media informasi, yaitu dengan cara membuat kebijakan baru yang

telah dilandasi dengan media elektronik informasi yaitu *e-government*. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, seperti peran pengambil keputusan, tata kelola, manajemen risiko implementasi sistem, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. (Maulana, n.d.)

Di era globalisasi, penerapan *e-government* ini sangat penting dikarenakan sudah memodernisasikan pemerintahan publik di seluruh. Karena kemajuan teknologi saat ini dan tujuan yang ingin dicapai, pemerintahan Indonesia juga berkewajiban untuk menerapkan *e-government*. Saat ini, prasyarat penggunaan *e-government* sangat penting untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik guna mendukung *good governance*. (Putri Manurung, n.d.)

E-government juga merupakan salah satu pengguna teknologi internet di dalam penyebaran informasi oleh pemerintah kepada masyarakat, yang dimana untuk lebih memudahkan penyampaian informasi yang ada. Dan dari sekian banyaknya sektor yang ada di pemerintahan saat ini, kita dapat melihat bahwa mereka telah menerapkan *e-government*. Pengembangan *e-government* ini lumayan mahal, sehingga perencanaan anggaran pengembangan *e-government* yang baik, pemberian, penggunaan, dan evaluasi siklus untuk secara efektif menerapkan strategi untuk mencapai tujuan strategis *e-government*. Oleh karena itu pengalokasian anggaran untuk pengembangan *e-government* harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu bisa dimanfaatkan dengan baik. (Data & Dan, 2006)

Indonesia berupaya untuk lebih meningkatkan implementasi sistem *e-government* Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau biasa disebut dengan *e-government* ini untuk mendukung pelayanan public melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB).

Singapura sendiri ternyata yang sudah menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam penerapan *E-government Development Index* yang sudah terbukti menjadi sistem yang sangat baik dalam penerapan SPBE. Untuk mewujudkan SPBE yang hebat di Singapura, langkah pertama ini dimulai dari merekrut SDM nya. Pemerintah Singapura sudah melibatkan beberapa perguruan tinggi yang diantaranya *Republic Polytechnic* (RP) dan *Institute of Technical Education* (ITE). Untuk menjaring staf yang berkualitas guna mendukung pemerintah dan dunia usaha, khususnya sektor teknologi. Selain itu, SDM yang sudah pernah bekerja dan menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Singapura akan dilatih dan diberikan pembekalan di *Civil Service College* (CSC). Di Negeri Singa itu juga sudah menerapkan *talent scouting* atau pencarian bakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.

KBRI Singapura memiliki inovasi terbaru yaitu dengan mengeluarkan Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) dan Kartu Pelaut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi sistem pelacakan, keamanan Pendidikan dan kualifikasi, pemantauan aktivitas dan jaminan pendapatan yang layak bagi warga negara Indonesia.

Meski kedua negara ini merupakan negara yang berada di Asia, tentu akan berbeda dari segi ekonomi dan teknologi. Singapura sendiri tergolong negara maju, sementara Indonesia masih negara berkembang. Untuk meningkatkan kualitas di masing-masing negara, pemerintah daerah telah mengembangkan kebijakan *e-government* yang di implementasikan oleh kedua negara tersebut dalam bentuk website.

B. Pengertian e-Government

Menurut definisi World Bank (2004), *e-government* merupakan salah satu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. (Slamet et al., n.d.)

Menurut Heeks dalam Achmad Djunaedi (2002), *e-government* itu sendiri sudah diartikan sebagai pemanfaatan *Information Communication and Technology* atau bisa disebut dengan ICT ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *e-government* mencakup:

1) *e-Administration*

Untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan menghemat biaya, mengelola kinerja, membangun koneksi strategis dalam pemerintah sendiri dan menciptakan pemberdayaan.

2) *e-Citizen & e-Services*

Menghubungkan masyarakat dan pemerintah dengan cara, memulai berbicara dengan masyarakat, mendukung akuntabilitas, mendengarkan masyarakat, mendukung dalam hal demokrasi, dan dengan meningkatkan layanan publik yang lebih baik lagi.

3) *e-Society*

Membangun hubungan di luar pemerintah yaitu dengancara bekerja lebih baik lagi dengan pihak bisnis, mengembangkan masyarakat, membangun kerjasama dengan pemerintah, dan membangun masyarakat madani.

Di dalam konsep *e-government* ada 3 jenis klasifikasi dan satu tambahan klasifikasi berdasarkan realitas kehidupan modern (Suaedi: 2010), di antaranya adalah:

1) *Government to Citizens (G-to-C)*. Tipe G-to-C merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan masyarakat;

2) *Government to Business (G-to-B)*. Tipe G-to-B merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan untuk memperlancar perusahaan swasta dalam menjalankan roda perusahaannya serta menciptakan relasi dengan pemerintah secara baik dan efektif;

3) *Government to Governments (G-to-G)*. Merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan antar pemerintah untuk memperlancar kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, maupun mekanisme hubungan sosial dan budaya;

4) *Government to Employees (G-to-E)*. Merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. (Resta, 2013)

Pelaksanaan *e-government* di beberapa negara berjalan dengan beberapa tahapan. Tahapan e-Government menurut Inpres No. 3 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi:
 - a. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
 - b. Penyiapan SDM;
 - c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll*;
 - d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
2. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi:
 - a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 - b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
3. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:
 - a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi:
 - a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, G2E dan G2C yang terintegrasi. (Dennis, 2014)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sifat yang tepat dari gejala atau tanda-tanda selanjutnya yang dimana perkembangan hubungan antara objek penelitian dengan fenomena social lainnya (Surachmad dalam Nurmandi & Purnomo, 2011).

Data ini diperoleh dengan kajian pustaka, melalui dokumen-dokumen resmi yang mencatat keadaan yang sudah terjadi dalam suatu objek penelitian, berupa majalah, hasil-hasil studi, tesis, maupun hasil survey dari berbagai instansi pemerintah maupun tidak (Hasan, 2002).

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mendokumentasikan data yaitu dengan cara pengumpulan bahan-bahan yang akan di dokumentasikan. Alat-alat yang sekiranya untuk menjadi media pengumpulan datanya dengan cara mempelajari data dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, seminar, tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini seperti, jurnal mengenai implementasi *government* yang ada di Indonesia dan Singapura. Yang dimana keduanya ini menampilkan bagaimana *e-government* dalam bentuk website yang ada di kota tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *e-government* di Indonesia

E-government merupakan sebuah penggunaan teknologi internet untuk menyebar luaskan informasi kepada masyarakat agar lebih memudahkan dalam penyediaan informasi. Banyak sektor di pemerintahan saat ini ternyata sudah menunjukkan bahwa mereka sudah menerapkan *e-government*. Dalam prakteknya, *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah pusat sudah membentuk Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), untuk melaksanakan ketersediaan sarana infrastruktur komunikasi dan informasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat agar dapat diakses dan dibaca secara cepat oleh instansi atau institusi pemerintah yang berada di wilayah Republik Indonesia. (Sufianti, 2007)

Diikuti Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEKOMINFO) dengan pedoman yang mengatur semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Pedoman tersebut mengatur perkembangan infrastruktur portal pemerintah, pengelolaan elektronik pemerintah dokumen, perencanaan pengembangan *e-government*, pelatihan TIK untuk mendukung implementasi *e-government*, dan implementasi lokal situs web pemerintah (Kementrian Komunikasi dan Informasi, 2003). Pemerintah Indonesia telah menetapkan empat target dalam mendukung *e-Government* sebagai berikut: tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yaitu; (1) Minimalkan Blankspot dengan akses telekomunikasi dan internet 100% terkonvergensi dan konvergen 80% dari siaran TV dan radio, (2) Internet kecepatan tinggi akses yang mampu menjangkau 497 ibu kota kabupaten/kota dalam jaringan tulang punggung optik, 71% penetrasi layanan broadband (20Mb), dan 10% penetrasi layanan seluler broadband (1Mb), (3) Mengoptimalkan penggunaan frekuensi spektrum dengan tersedianya spektrum

frekuensi 500 Mhz untuk wireless broadband (LTE), (4) Menghubungkan semua instansi pemerintah melalui TIK atau membuat sistem pemerintahan terpadu (BAPPENAS, 2015). (Salsabila & Purnomo, 2017)

Tahap stabilisasi dikategorikan sebagai situs website atau aplikasi yang menyediakan satu layanan elektronik yang diperuntukan untuk layanan publik. Dan tahap pemanfaatan merupakan aplikasi yang menekankan pada integrasi G2G, G2B, dan G2C, terdapat 1 pemerintah provinsi dan 3 pemerintah kabupaten/kota yang sudah sampai dalam tahap ini yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Di Indonesia sendiri sudah memiliki website nasional yang menyediakan informasi secara umum bagi masyarakat Indonesia dengan URL www.Indonesia.go.id. Di website tersebut sudah terdapat berbagai macam informasi yang tersedia mengenai berita secara nasional, profil Indonesia dengan fitur-fitur pilihan yaitu sistem pemerintahan, parlemen, agama, peta Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, konstitusi, lembaga negara, lagu kebangsaan dan bahasa, peraturan, kementerian/lembaga, suku bangsa, pemerintah provinsi, data, dan statistik Indonesia. (*INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia*, n.d.)

Menurut berita nasional yang sudah disampaikan dalam situs website tersebut, terdapat berbagai macam contoh budaya, seni, keanekaragaman hayati, komoditas, wisata, dan kuliner. Misalnya layanan/jasa seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, kependudukan, perdagangan, investasi, dan bea cukai. Sementara itu ada sebuah fitur lain contohnya "lapor" yang terhubung dengan website lapor.go.id. Tetapi, website pengaduan dari keluhan masyarakat tersebut masih belum dapat diakses dengan baik.

Dalam studi banding (Prihanto, 2013) posisi Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain dalam penerapan *e-government* dalam hal pengembangan layanan online, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, maupun sumber daya manusia. Untuk mengetahui apakah ada implementasi *e-government* di daerah tersebut dan apakah ada situs website di daerah tersebut. Keberadaan website merupakan Langkah awal implementasi *e-government*. (A Hasibuan, Zainal; Harry, 2005)

UNDESA (2014) melaporkan bahwa dari segi e-service, Indonesia masih termasuk dalam kelompok menengah. Sebuah studi kasus oleh Dewi (2011) menemukan implementasi e-government yang sukses di sebuah desa di Provinsi Yogyakarta. Namun, ada kendala sumber daya, lokasi, dan pengetahuan teknis yang dihadapi desa. (Sutopo et al., 2017)



Gambar 1. Website *e-government* di Indonesia

Sumber Gambar <https://www.indonesia.go.id/>

Implementasi *e-government* di Singapura

Perkembangan *e-government* dimulai pada tahun 1980 dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan yang ada di Singapura menjadi pengguna teknologi informasi kelas dunia. Pemerintahan Singapura sudah memiliki rencana dasar pembangunan jaringan teknologi komunikasi. Yang pertama adalah program Komputerisasi Pelayanan Sipil (*Civil Service Computersation Programme*) pada tahun 1981, National IT Plan pada tahun 1986, dan IT 2000 pada tahun 1992.

Di Singapura selalu melakukan revisi ulang terhadap tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berpotensi menimbulkan nilai perusahaan secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir. (Christopher, Jesslyn, Leonardi, n.d.)

Program pengembangan TIK ini telah beroperasi selama kurang lebih 20 tahun, termasuk dalam pengembangan program *Infocomm Development Authority* atau Dewan Otoritas Informasi dan Komunikasi. Inilah awal mula merupakan pemerintah Singapura yang khusus mengembangkan *e-government* ini memiliki visi bahwa Negara Singapura sebagai negara yang mempunyai koneksi hubungan dengan jaringan komunikasi atau *wired island*.

Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Singapura meluncurkan Singapore ONE pada tahun 1998, ini dapat dimasukkan sebagai program dasar yang bertujuan untuk memungkinkan koneksi cepat jaringan internet untuk semua orang di rumah, kantor, sekolah, dan di berbagai tempat umum.

Program Singapore ONE ini berjalan pada tiga tahap yaitu, pada tahap pertama di tahun 1996-1997 merupakan tahap pembangunan infrastruktur dan kunci dari pelayanan. Tahun berikutnya 1998-2002 menjadi tahap peluncuran dan adaptasi awal dari infrastruktur yang telah dibangun. Tahap ini juga telah berfokus pada pengembangan industri jaringan internet dan peluncuran berbagai aplikasi dan layanan. Tahun 2002 dan selanjutnya merupakan tahap akhir dimana pemerintahan Singapura menggerakkan teknologi ini agar diaplikasikan dalam lingkungan kerja, rumah dan lingkungan pembelajaran. (Khalifah, 2015).

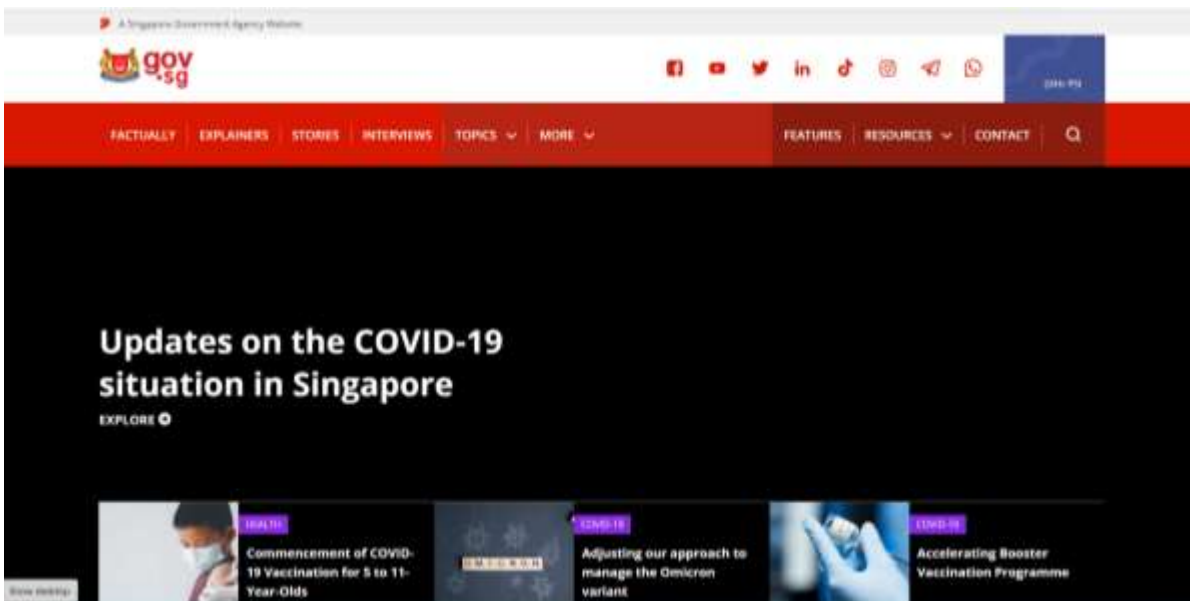
Selain itu, seperti di Indonesia, Singapura juga memiliki website nasional yang berisikan informasi publik. Website dengan URL www.gov.sg yang memiliki berita terkini, seni dan budaya, keamanan nasional, ekonomi dan keuangan, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan, diplomasi, kesehatan, perumahan, imigrasi dan kewarganegaraan, informasi, komunikasi, dan teknologi, hukum dan pemerintahan, proteksi dari hoax online, dan manipulasi, perpajakan, social dan komunitas, dan, transportasi. Situs website pemerintah ini juga mencakup Pusat Pers Singapura atau Singapore Press Centre, Government Terms Translated, Government Directory, Trusted Sites (Informasi tentang situs website pelayanan yang ada di Singapura), dan e-services. (*A Singapore Government Agency Website, n.d.*)

Pemerintah Singapura telah mengambil pendekatan untuk menggambarkan domain utama dari kehidupan masyarakat dan membangun klaster informasi dan layanan untuk mereka. Portal e-Citizen menyediakan informasi dan layanan online satu atap yang dikelompokkan secara intuitif di sepanjang domain tersebut. E-Citizen Center saat ini memiliki lebih dari 1.700 layanan dari 2.600 layanan yang dapat disampaikan secara elektronik. Selain itu, perkembangan lebih lanjut dari teknologi seluler berarti bahwa layanan e-government kini dapat diakses menggunakan perangkat genggam, sehingga meningkatkan aksesibilitas secara signifikan. Layanan yang tersedia melintasi beberapa bidang termasuk seni dan budaya, pendidikan, keluarga, kesehatan, pekerjaan dan keselamatan dan keamanan. Warga negara dapat membayar denda, mengajukan izin, membayar pajak, memperoleh informasi yang berkaitan dengan fasilitas masyarakat dan mengunduh publikasi pemerintah melalui portal online. (Ray & Peter, 2003)

Pada tahun 2009, Singapura menjadi negara Asia pertama yang menyediakan layanan web 2.0 kepada seluruh guru untuk berkomunikasi dan berkolaborasi melalui platform cloud standar. Selain itu, di Portal Pemerintah Singapura juga disediakan layanan pembayaran online untuk masyarakatnya. Mulai dari pembayaran pajak, denda, hingga pembuatan lisensi dengan mudahnya dapat diakses melalui portal ini yang telah terhubung dengan jaringan kartu debit maupun kredit. (Mira Tania S, n.d.)

Singapura menyediakan banyak variasi dan layanan publik yang terintegrasi secara dinamis secara online. Pada akhir tahun 2001, Singapura berhasil mendapatkan 92% dari semua layanan publik dapat dikirim secara online.

Dalam studi komparasi (Prihanto, 2013) menjelaskan bahwa *e-government* di Singapura lebih diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan online dibandingkan dengan infrastruktur telekomunikasi maupun sumber daya manusia. Singapura termasuk dalam negara dengan komponen layanan online yang memiliki skor tertinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat kecepatan dan kemampuan dalam pengembangan *e-government* secara signifikan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan negara lainnya. Keberhasilan ini disebabkan oleh fakta bahwa Singapur umumnya menyediakan layanan web 2.0 untuk berkomunikasi melalui platform cloud dan layanan online lainnya untuk masyarakat yang mencakup pembuatan lisensi, denda, pembayaran pajak dan lain-lain.



Gambar 1. Website *e-government*

Sumber Gambar <https://www.gov.sg/>

Perbandingan *e-government* Singapura dan Indonesia

Perbandingan perkembangan *e-government* yang ada di Indonesia yaitu dalam pembahasannya menurut (Yunita & Aprianto, 2018) mengatakan bahwa dengan jumlah 548 pemerintah daerah di 34 provinsi, terdapat 34 website/aplikasi masih dalam tahap persiapan namun tidak dipertimbangkan dapat diakses/tidak dengan beberapa alasan, yaitu website sedang dalam perbaikan, gagal koneksi dengan basis data, suspended, server error dan lain sebagainya.

Saat ini terdapat 341 website/aplikasi yang dalam tahap matang yaitu website yang menawarkan salah satu media. Contoh Media Interaksi Pemerintah-Website yang memungkinkan pengunjung untuk terhubung dan berinteraksi dalam bentuk link ke beberapa institusi lain, email, nomor telepon, survei, formulir masukan, forum diskusi, SMS atau chat Kami juga menyediakan formulir. Kedua,

terdapat 115 website atau aplikasi dalam fase integrasi dan 4 website atau aplikasi dalam fase penggunaan.

Dengan pemikiran ini, Pemerintah Singapura telah mulai menggunakan Sistem Pemerintah Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, Indonesia masih belajar bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan SPBE/*e-government*. Di Singapura, eGovernment saat ini diimplementasikan di situs web bernama ECitizen Portal. Di situs web ini, orang dapat bertanya, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, mengubahnya menjadi portal, dan mengelola segala macam dokumen, termasuk paspor, akta kelahiran, dan izin lainnya. Melalui website antar kedua negara, kondisi Indonesia masih bermasalah, belum semua daerah menggunakan *e-government* untuk mengoperasikan layanan, website yang ada dikarenakan database yang tidak lengkap. kesalahan terbatas dan tidak semua situs web terjadi.

Penerapan *e-government* di Singapura dimana masyarakatnya diharuskan melakukan pengurusan passport dan akta kelahiran secara online, jika si pemohon ini datang maka akan dikenakan penalty dan jika sudah dikenakan penalty maka si pemohon ini diharuskan untuk tetap mengajukan permohonan secara online/*electronic*. Penerapan *e-government* yang ada di Indonesia ini sudah diwujudkan diberbagai bidang yang dimana unruk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Tahapan pengembangan *e-government* di Indonesia ini masih terbatas dalam hal interaksinya dan masih belum sepenuhnya dikarenakan masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menerapkan *e-government* ini. Dan untuk di Singapura sendiri website nya sudah lebih berkembang jauh sebelum negara Indonesia. Oleh karena itu, penerapannya untuk saat ini sudah bisa dikatakan lebih baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik lagi oleh masyarakat.

Kendala yang dihadapi

Menurut Retnowati ini mengatakan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan *e-government* ini ada beberapa faktor, yaitu kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah setempat, kesiapan SDM di dalam pemerintah, faktor yang bisa dikatakan paling bermasalah ada di bagian SDM karena kurangnya tenaga ahli dibidang IT yang ada di Indonesia, masih banyak SDM di pemerintah yang masih belum bisa menggunakan teknologi yang sudah maju.

Kendala yang mendasar dalam menyelenggarakan *e-government* di pemerintah daerah itu berupa minimnya peraturan daerah yang mengatur mengenai penerapan *e-government* ini, belum adanya inisiatif untuk saling berbagi informasi dan mendokumentasikan semua informasi, kurangnya SDM yang bisa menggunakan teknologi yang sudah maju ini, infrastruktur nya yang mahal dan belum bisa memadai dan akses yang terbatas. (Wirawan, 2020)

Terdapat kelemahan pada penerapan e-Government di Indonesia dibandingkan dengan Negara lain, karena perbedaan dari segala aspek, yaitu pendidikan, sistem pemerintahan, sosial ekonomi, budaya, sosiologi, politik dan lain sebagainya. Di Indonesia masih terjadi gap-digital di masyarakat luas, hal ini diwajarkan karena sebagian besar masyarakat yang sudah dewasa lahir sebelum era internet. (Slamet, Hamdan, Deraman : 2007)

Kesenjangan e-Government antara negara maju dan negara berkembang sangat besar. Sebagian besar negara berkembang memiliki sumber daya yang terbatas, yaitu infrastruktur TIK yang buruk, dan harus menghadapi begitu banyak tantangan sebagai faktor penghambat seperti faktor sosial & budaya, faktor sumber daya manusia, faktor ekonomi, faktor politik, dll. Dengan demikian, negara berkembang harus mengatasi hambatan selama pengembangan e-Government baik faktor internal maupun eksternal. (Napitupulu et al., 2018)

Peran e-government

Pelayanan publik saat ini sudah menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam sebuah persaingan. Pelayanan publik yang menjadi salah satu kunci ini dikarenakan adanya ukuran masing-masing indikator yang sudah diteliti ini yang merupakan salah satu bagian dari standar pelayanan, dimana pelayanan itu bisa berupa prosedur, waktu, dan biaya. Fungsinya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi salah satu bagian dari kelas dunia, seperti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah mengadakan sosialisasi di beberapa wilayah.

Pentingnya digital dalam mengelola pemerintahan. Bahkan Profesor Bidang Politik dan Kebijakan Publik *London School of Economics and Political Science* (LSE) juga menyatakan bahwa "*New Public Management is Dead, Long Live Digital Era Governance*". Dengan adanya sistem e-government ini mempunyai beberapa peluang yaitu meningkatnya efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sistem e-Government. (Hardjaloka, 2014).

Namun demikian, pemerintah mendorong para penyelenggara pelayanan untuk melakukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, maka inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelayanan berbasis teknologi informasi, saat ini Pemerintah pun mulai mengembangkan e-government.

Sistem ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mengimplementasikan pemanfaatan e-government teknologi komputer, jaringan komputer dan teknologi informasi yang dimana untuk menjalankan sistem pemerintahan, terlebih lagi dibagian pelayanan publik yang masih sangat sedikit. Sistem e-government itu

sendiri ternyata jugamempunyai berbagai manfaaat yang banyak dalam sistem berdemokrasi yang saat ini yang sudah diterapkan, yaitu diantaranya untuk meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet.

Pentingnya digital dalam mengelola pemerintahan. Bahkan Profesor Bidang Politik dan Kebijakan Publik London School of Economics adn Political Science (LSE) juga menyatakan bahwa "*New Publik Management is Dead, Long Live Digital Era Governance*". Dengan adanya sistem *e-governement* ini mempunyai beberapa peluang yaitu meningkatnya efektifitas, efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sistem e-Government.

E. SIMPULAN

E-government merupakan salah satu sistem yang telah dikembangkan oleh pemerintah untuk menyediakan banyak pilihan bagi masyarakat untuk memfasilitasi akses ke informasi dan pelayanan publik yang membantu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di negara ini.

Perkembangan sistem *e-governement* yang ada di Indonesia semakin berubah dari segi kuantitatif, namun masih kurang memadai dari segi kualitas karena implementasi *e-governement* sendiri belum merata antar daerah. Indonesia memiliki kemampuan untuk memberikan informasi statis saat ini. Peningkatan kualitas memerlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan pengembangan *e-governement* terutama dalam hal infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal yang ada di pemerintahan maupun kepada masyarakat.

Hasil dalam penelitian ini yaitu implementasi *e-governement* di era revolusi industri saat ini berdampak besar terhadap implementasi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap negara memiliki formulanya sendiri untuk mencapai hal tersebut melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Indonesia dan Singapura penerapan *e-governement* dapat dilihat pada penerapan masing-masing daerah dalam penggunaan *e-governement* baik dalam pengendalian internal pemerintahan maupun menginformasikan kepada masyarakat luas.

Namun, membandingkan kedua negara, perkembangan e-government Singapura masih tertinggal karena sistem *e-governement* Singapura diluncurkan saat Kementerian PANRB berkunjung ke Singapura. Kemajuan layanan elektronik pemerintah sangat maju. Untuk membantu, Indonesia mengadaptasi program pemerintah Singapura dan inovasi layanan elektronik pemerintah.

Sistem *e-governement* ini, dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi, dapat berkontribusi pada dukungan pemerintah untuk komunikasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah bisnis, dan pemerintah dengan pemerintah lain. Agensi akan selesai. Tantangan yang terkait dengan implementasi dan implementasi *e-governement* perlu disikapi dengan strategi yang efektif agar

semuanya berjalan lancar, meski dengan hambatan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasibuan, Zainal; Harry, B. S. (2005). Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia*, 16424, 42-48.
- A Singapore Government Agency Website. (n.d.). <https://www.gov.sg/>
- Christopher, Jesslyn, Leonardi, V. (n.d.). *Good Governance, Good Citizen*. <https://goodgovernanceproject.blogspot.com/2014/04/penerapan-good-governance-di-singapura.html>
- Data, B., & Dan, P. (2006). Basis data peraturan dan perundang-undangan. *The program*, 1-14.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>
- INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia. (n.d.). <https://www.indonesia.go.id/>
- Maulana, I. (n.d.). *Refleksi E-Goverment Negara Singapura terhadap Perkembangan E-Government Negara Indonesia* Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Refleksi E-Goverment Negara Singapura terhadap Perkembangan E-Government Negara Indonesia", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/irvan71844/60dac97415251016de41d953/refleksi-e-goverment-negara-singapura-terhadap-perkembangan-e-goverment-negara-indonesia>
- Mira Tania S. (n.d.). *Sepuluh Negara dengan Indeks e-Government Tertinggi*. <https://miratania.wordpress.com/2014/04/06/sepuluh-negara-dengan-indeks-e-government-tertinggi-bagian-i/>
- Napitupulu, D., Syafrullah, M., Rahim, R., Amar, A., & Sucahyo, Y. G. (2018). Content validity of critical success factors for e-Government implementation in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 352(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/352/1/012058>
- Putri Manurung. (n.d.). *Penerapan E-Goverment di beberapa Negara*. <https://putrimanurung09111003026.blogspot.com/2014/09/penerapan-e-goverment-dibeberapa-negara.html>
- Ray, L., & Peter, A. (2003). *QUT Digital Repository : study*. 5(January), 214-220.
- Resta, A. (2013). Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website kota Semarang). *Journal of Public and Government (e-Journal S-1 Undip)*, 2(4),

126-135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3583>

- Salsabila, L., & Purnomo, E. P. (2017). Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study : e-Government Implementation between Korea and Indonesia). *Asian/ Asia Academic Society International Conference (Basic)*, 5, 221-229.
- Slamet, Hamdan², A. R. bin, & Deraman³, ; Aziz. (n.d.). *RESTRUKTURISASI DAN REORIENTASI MENUJU PERCEPATAN TARGET E-GOVERNMENT DI INDONESIA*. 1-6.
- Sufianti, E. (2007). Aplikasi e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(4), 3.
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, audit opinion, and performance of local government administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6-22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>